

Politik Aywawere, masihkah?

Bali itu penuh simbol. Tak banyak yang bisa langsung memahami maknawinya. Pun peneliti asing, Stheppen Lansing (2006) salah satunya. Hildred Geertz (1975) saat menulis kekerabatan orang Bali juga pusing, dan menyimpulkan Bali itu dalam banyak hal *misfeas-ating*. Durasi dalam kebudayaan lain adalah kenyamanan waktu, di Bali tidak kenyaman waktu, lebih penting karena banyak idiom justru bisa lahir. Bali itu dinamis, tak pernah diam, namun dalam ritmiknya malah tak mau pergi ke puncak. Turun ke bawah hanya untuk naik kembali. Titik seimbang tak pernah lama, apalagi menaruh, sewindu, sedekade. Begitu juga dalam dunia wacana, dominasi dan hegemoni tak pernah kokoh. Aywawere salah satunya.

Bali menyukai hal-hal baru, apa saja. Tak ada yang tak pernah di uji kelayakannya. Bali menjadi meta-arena untuk memproduksi sekaligus merevisi kebudayaan. Trend silih berganti, mengabarkan batas transisi. Demarkasi purba dan post-modern tak jelas. Mana *sekata* dan *niskala*, semu karena

sirkulasi waktu. Menikmati Bali adalah cara terbaik membiarkan dua dunia saling bercumbu, berpagut. Hari ini sakral, esok profan, tak apa. Dulu aywawere sekarang buka-bukaan, itu biasa. Di Bali, semua menjadi bolak-balik. Hanya momentum menjajadi pembedanya.

Dahulu ketika kekuasaan—dan tentu saja juga kebenaran—dipegang raja, rakyat tutup mulut, patuh tunduk. Melawan raja adalah alamt pasti kematitan. Jika tak mati, paling tidak *temah dewa*, *sakit gedé*. Raja adalah Tuhan *sekata*. Begitu monolitik. Sayangnya, kesempatan ini sering menjadi alat mempertahankan kekuasaan. Titah dan kedudukan istimewa akhirnya menjadi politik. Adab ini sudah sejak lama, bukan baru-baru saja. Ampas masa lalu yang masih terasa manis terus terpelihara hingga kini. Pemimpin ormas, ketua gank, hingga pimpinan tukang parkir jika sudah dibaluri kekuasaan absolut, ditambah madu keturunan yang istimewa, lumrah menjadi pongah. Mereka bisa sangat gagah karena *privilege*.

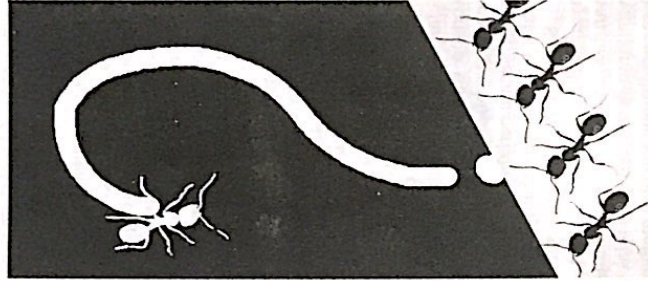
Di pusat-pusat kekuasaan, politik pembungkaman dapat

dilakukan dengan ragam cara. Karakteristik budaya yang mengeras-kuat dalam diri seseorang biasanya mudah dikendalikan. Menurut kabar, Soeharto (alm) lebih memainkan politik identitasnya sebagai orang Jawa dengan memanfaatkan budayanya sebagai alat pemerintahan diri. Soeharto menghirup habis udara kekuasaan dari laku orang sekiarannya, dan terutama suasana kebatinan yang diperangkainya melalui sunggingan senyum. Begitulah politik kekuasaan, bukan hanya semi-menguasai orang tetapi juga mengendalikan hingga ke ruang dapur bawahannya.

Di pusat-pusat kekuasaan atas teks dan sastra agama, sama saja, persis. Aywawere pernah digunakan secara penuh membungkam orang lain untuk se-kadar memiliki akses membaca. Aywawere menjadi penutup jalan pengetahuan. Aywawere adalah alat untuk mendominasi dan menghegemoni. Tak terbalik, hukum apa jika seseorang berhasil memahami apalangi mempraktikkan apa yang dibacanya; tak terpikir, sanksi apa jika seseorang berhasil setara

apalagi berada di atas sang penguasa teks. Semua orang ketika itu sukses dibuat tak ber-kutik karena ruang psikologisnya atas ketakutan kena *tulah* disentuh. Orang Bali takut, sangat takut untuk urusan yang satu ini. Karena itu, jika pagi hari mereka pergi ke dokter spesialis, sore hari ke *balian* adalah yang biasa saja. Bahkan pusing kepala diobati keramas saja sudah cukup, tak perlu repot.

Politik aywawere kini mengalami transformasi, meskipun politik ini tidak akan pernah benar-benar hilang tanpa bekas. Momentum dan panggung peristiwanya akan membekadaknya. Hanya itu, selebihnya sama. Pertama, dengan semakin banyak umat Hindu melekat kitab suci, teks, dan sastra agama, kita mendapat kalimat-kalimat yang sangat terang bahwa seorang guru jika menutup jalan pengetahuan muridnya, ia penuh pada. Bahkan hanya tidak membolohkan muridnya bertanya untuk mengetahui sesuatu, seorang guru akan berdosa besar. Jika benar seperti itu, pengetahuan akan menjadi milik ber-



sama, bukan lagi dikuasai orang per orang.

Kedua, sumber informasi kini semakin banyak, cenggih dan terus mutakhir tanpa jeda. Bahkan melalui handphone

I Nyoman Yoga Segara

pintar kita bisa berselancar ke mana saja. Kebiasaan ini kita lakukan juga di mana saja, tak kenal waktu dan tempat. Sudah tak ada yang bisa disembunyikan. Politik aywawere untuk menghentikan informasi seperti ini sudah tak laku lagi. Ketiga, generasi milenial yang semakin dominan populasinya, tak lagi mempercayai orang lain, namun berpusat pada dirinya sendiri. Memaksa mereka "diam" dan mempercayai tabayul melalui aywawere dengan cara yang kaku, apalagi menakut-nakuti sudah tak mempan lagi.

Tapi tunggu dulu. Politik aywawere kini juga mengganti wajahnya dengan legitimasi yang dibuat sendiri. Mengikuti arus saat ini, setiap orang sekolah punya hak untuk mengaywawere-kan orang lain. Jika tak percaya, lihat saja di layar media sosial kita. Mari!

Pentlis, antropolog IHDN Denpasar